



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2026.
- KESATU : Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2026  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Enrekang  
Pada tanggal, 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2026

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK), DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN ENREKANG**

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN / KEGIATAN</b>					
<b>1.</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>					
1.	Penyusunan Tim Kerja	Terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Bulan Januari	Ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
2.	Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas	Membuat Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Bulan Januari	Ditetapkannya Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Menyusun Hasil Pemantauan dan Evaluasi WBK/WBBM	Bulan Desember	Terselesainya Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi	Januari - Desember	Terpenuhinya Pola Pikir Pegawai mengacu kepada perilaku Pimpinan sebagai role model	Kehadiran Pegawai dalam mengikuti Apel Pagi dan Kehadiran Masuk Kantor
<b>2.</b>	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>					
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terbentuknya SOP yang mengacu Kegiatan pada Instansi	Menyusun SOP yang mengacu Kegiatan pada Instansi	Januari - Desember	Ditetapkannya SOP yang mengacu kegiatan pada Instansi	SOP yang mengacu kegiatan pada Instansi
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terlaksananya pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Pemenuhan Pemanfaatan pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi	Januari - Desember	Terpenuhinya Penggunaan pengukuran kinerja unit dengan teknologi informasi (Aplikasi dan Media Sosial)	Penggunaan pengukuran kinerja unit dengan teknologi informasi (Aplikasi dan Media Sosial)
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	Membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)	Januari - Desember	Ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dan Penyebaran seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Menyusun Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Terselesaikannya Dokumen Hasil dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
<b>3.</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR</b>					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Pemenuhan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Januari - Desember	Terpenuhinya Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Daftar Nominatif Kepegawaian
2.	Pola Mutasi Internal	Terlaksananya Rotasi Pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja, dan kompetensi pegawai	Pemenuhan Rotasi Pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja, dan kompetensi pegawai	Januari - Desember	Terpenuhinya Rotasi Pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja, dan kompetensi pegawai	Surat Keputusan Mutasi Pegawai
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Januari - Desember	Terpenuhinya pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikat Pelatihan Pegawai

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
	4. Penetapan Kinerja Individu	Tersusunnya penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)	Menyusun penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)	Januari - Desember	Terselesainya penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)	Dokumen penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
	5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Terimplementasinya Penerapan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Pemenuhan Penerapan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Januari - Desember	Terlaksananya Penerapan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Dokumen bukti penegakan disiplin
	6. Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai yang telah dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai	Pemenuhan data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai yang telah dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai	Januari - Desember	Terpenuhinya data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai yang dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai	Dokumen Database Pegawai
<b>4.</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>					
	1. Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan unit kerja selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan	Pimpinan terlibat dalam Penyusunan dan evaluasi perencanaan kinerja	Januari - Maret	Terpenuhinya keterlibatan Pimpinan dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	
	2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya Dokumen perencanaan kinerja	Menyusun Dokumen perencanaan kinerja	Januari - Maret	Terselesaikannya Dokumen perencanaan kinerja	Dokumen Perencanaan Kinerja
<b>5.</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>						
	1.	Pengendalian Gratifikasi	Tersosialisasikannya Pengendalian Gratifikasi	Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai di KPU Kabupaten Enrekang tentang pengendalian gratifikasi	Januari - Maret	Tersampainya informasi kepada pegawai di KPU Kabupaten Enrekang tentang pengendalian gratifikasi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan
	2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terbentuknya lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi serta sesuai dengan karakteristik unit kerja	Membentuk lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi serta sesuai dengan karakteristik unit kerja	Januari - Desember	Ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang satgas SPIP	Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang satgas SPIP
	Tersusunnya Peta risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan disetiap sub bagian		Menyusun Peta risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan disetiap sub bagian	Januari - Desember	Ditetapkan Peta risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan disetiap sub bagian	Dokumen Penyusunan Peta risiko	
	Terkomunikasikannya SPIP kepada seluruh pegawai		Menginformasikan serta mengkomunikasikan Petunjuk teknis SPIP kepada seluruh pegawai	Januari - Desember	Tersampainya Petunjuk teknis SPIP kepada seluruh pegawai	Dokumentasi	

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya layanan Pengaduan masyarakat	Menyediakan layanan pengaduan masyarakat	Januari - Desember	Terpenuhinya layanan pengaduan masyarakat	Layanan Pengaduan masyarakat
4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	Sosialisasi kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>	Mengikuti sosialisasi kebijakan Whistle Blowing System	Januari - Desember	Tersampainya urgensi melalui sosialisasi kebijakan Whistle Blowing System dalam pembangunan Zona Integritas	Pelaksanaan kegiatan
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Tersusunnya identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Januari - Desember	Terpenuhi identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
<b>6.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					
1.	Standar Pelayanan	Tersusunnya kebijakan standar pelayanan	Menyusun kebijakan standar pelayanan	Januari - Desember	Tersampainya kebijakan standar pelayanan	Dokumentasi kebijakan standar pelayanan
2.	Budaya Pelayanan Prima	Tersosialisasikannya pelayanan prima kepada petugas/pelaksana layanan	Terpenuhinya pelayanan prima kepada petugas/pelaksana layanan	Januari - Desember	Terlaksananya budaya pelayanan prima	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
3.	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik secara luring dan daring	Januari - Desember	Setiap Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Laporan Pengaduan Masyarakat
4.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Publikasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Januari - Desember	Terpublikasinya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Laporan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

[icik.kpu.go.id/sulse/enrenkang](http://icik.kpu.go.id/sulse/enrenkang)

NO.	PEMENUHAN / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
	5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan Publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan Pelayanan Publik dengan menggunakan Teknologi Informasi	Januari - Desember	Terpenuhinya Pelayanan Publik dengan menggunakan Teknologi Informasi	Dokumen Laporan Pelayanan Publik

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENREKANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Fatmawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

MUNIR ANAS